



**089.01.3400.689266 KD**



# **LAPORAN KEUANGAN** **(AUDITED)**

**PERWAKILAN**  
**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**  
**PROVINSI SULAWESI BARAT**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016**

**NOMOR : LKE-454/PW32/1/2017**  
**TANGGAL : 10 APRIL 2017**

089.01.3400.689266.KD



**LAPORAN KEUANGAN**  
**(AUDITED)**

**PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016**

**TAHUN ANGGARAN 2016**

**NOMOR : LKE-454/PW32/1/2017**  
**TANGGAL : 13 APRIL 2017**

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas / pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Mamuju, 10 April 2017

Kepala Perwakilan, /



## DAFTAR ISI

### Halaman

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Lampiran	iv
Pernyataan Tanggung Jawab	v
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis	7
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	8
A.3. Basis Akuntansi	9
A.4. Dasar Pengukuran	9
A.5. Kebijakan Akuntansi	9
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	18
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	19
B.2. Belanja Negara	19
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	25
C.1. Aset Lancar	25
C.2. Aset Tetap	27
C.3. Kewajiban Jangka Pendek	30
C.4. Ekuitas	30
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	31
D.1. Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Operasional	31
D.2. Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	37
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	40
E.1. Ekuitas Awal	40
E.2. Surplus/ (Defisit) LO	40
E.3. Koreksi Yang Menambah/ (Mengurangi) Nilai Ekuitas	40
E.4. Transaksi Antar Entitas	41
E.5. Ekuitas Akhir	42
F. Informasi Penting Lainnya	43
Informasi Dana Penugasan Beban Mitra Kerja	43



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Perbandingan Realisasi PNBP Tahun 2016 dan 2015	19
Tabel 2 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program Tahun 2016	20
Tabel 3 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja Tahun 2016	20
Tabel 4 : Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2016 dan 2015	21
Tabel 5 : Rincian dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2016	22
Tabel 6 : Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2016 dan 2015	22
Tabel 7 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Tahun 2016	22
Tabel 8 : Perbandingan Realisasi Belanja Barang Tahun 2016 dan 2015	23
Tabel 9 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2016 dan 2015	24
Tabel 10 : Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2016 dan 2015	25
Tabel 11 : Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 dan 2015	25
Tabel 12 : Rincian Belanja Dibayar di Muka ( <i>prepaid</i> ) per 31 Desember 2016	26
Tabel 13 : Rincian Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015	27
Tabel 14 : Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2016 dan 2015	27
Tabel 15 : Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016	29
Tabel 16 : Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO Tahun 2016 dan 2015	31
Tabel 17 : Rincian Beban Operasional Tahun 2016 dan 2015	32
Tabel 18 : Rincian Beban Pegawai Tahun 2016 dan 2015	33
Tabel 19 : Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Pegawai Tahun 2016 Menurut LO dan LRA	33
Tabel 20 : Rincian Beban Persediaan Tahun 2016 dan 2015	34
Tabel 21 : Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2016 dan 2015	34
Tabel 22 : Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Barang dan Jasa Tahun 2016 Menurut LO dan LRA	35
Tabel 23 : Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2016 dan 2015	35
Tabel 24 : Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2016 dan 2015	36
Tabel 25 : Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2016 dan 2015	37
Tabel 26 : Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2016 dan 2015	38
Tabel 27 : Perbandingan Realisasi Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2016 Menurut LO dan LRA	38
Tabel 28 : Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2016 dan 2015	39

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Laporan Keuangan Pokok
  - A. Neraca Saldo Awal
  - B. Neraca Percobaan Basis Kas
  - C. Neraca Percobaan Basis Akrual
  - D. Laporan Realisasi Anggaran
  - E. Neraca
  - F. Laporan Operasional
  - G. Laporan Perubahan Ekuitas
2. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah
3. Laporan Realisasi Anggaran Belanja
4. Neraca SIMAK BMN per 31 Desember 2016
5. Daftar Tanah



## **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**



**PERWAKILAN  
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Mamuuu, 10 April 2017

*[Signature]* Kepala Perwakilan, /



Wasis Prabowo

NIP. 19651031 198703 1 001





## **RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN**

## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja sampai dengan 31 Desember 2016.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2016 adalah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp56.344.476,000. Dalam TA 2016 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat tidak membuat estimasi pendapatan.

Realisasi Belanja Negara s.d. 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp12.242.942.436,00 atau mencapai 96,35 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp12.706.208.000,00.

### 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2016 dan 2015.

Nilai Aset per 31 Desember 2016 dicatat dan disajikan sebesar Rp41.466.308.776,00 yang terdiri atas Aset Lancar sebesar Rp208.110.074,00 dan Aset Tetap (netto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp41.258.198.701,00

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp26.504.802,00 dan Rp41.439.803.973,00

### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Surplus/(Defisit) sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar minus Rp14.507.574.588,00

Jumlah tersebut terdiri atas:

- Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar minus Rp14.509.129.575,00 yang merupakan selisih antara Pendapatan Operasional sebesar Rp52.904.476,00 dikurangi dengan Beban Operasional sebesar Rp14.562.034.051,00
- Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp1.554.987,00 dan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar minus Rp1.554.987,00

#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2016 adalah sebesar Rp43.409.620.635,00 dikurangi Defisit LO sebesar Rp14.507.574.588,00, ditambah dengan Koreksi Yang Menambah (Mengurangi) Nilai Ekuitas sebesar minus Rp351.159.966,00 ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp12.186.597.960,00 sehingga Ekuitas Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp41.439.803.973,00

#### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode sampai dengan 31 Desember 2016 disusun dan disajikan dengan basis akrual.



## LAPORAN REALISASI ANGGARAN

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI BARAT  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015**

(dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2016			31 DES 2015 REALISASI
			ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI THD ANGGARAN	
A	<b>PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH</b>	B.1				
	■ Penerimaan Negara Bukan Pajak		-	56.344.476	-	326.859.299
	<b>Jumlah Pendapatan Negara &amp; Hibah</b>		-	<b>56.344.476</b>	-	<b>326.859.299</b>
B	<b>BELANJA</b>	B.2				
	■ Belanja Pegawai		8.360.425.000	8.022.811.814	95,96	8.284.086.798
	■ Belanja Barang		4.345.783.000	4.220.130.622	97,11	5.071.342.271
	■ Belanja Modal		-	-	-	2.505.514.973
	<b>Jumlah Belanja</b>		<b>12.706.208.000</b>	<b>12.242.942.436</b>	<b>96,35</b>	<b>15.860.944.042</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.



## NERACA



**II. NERACA**

**PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI BARAT**  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015**

(dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 DES 2016	31 DES 2015
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>	<b>C.1</b>		
■ Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	0	55.614.380
■ Belanja Dibayar Dimuka ( <i>prepaid</i> )	C.1.2	48.382.500	45.315.000
■ Persediaan	C.1.3	159.727.574	264.832.968
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		<b>208.110.074</b>	<b>365.762.348</b>
<b>ASET TETAP</b>	<b>C.2</b>		
■ Tanah	C.2.1	2.042.703.750	2.042.703.750
■ Peralatan dan Mesin	C.2.2	6.232.014.285	6.232.014.285
■ Gedung dan Bangunan	C.2.3	34.520.500.913	34.520.500.913
■ Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4	4.292.795.369	4.292.795.369
■ Akumulasi Penyusutan	C.2.5	(5.829.815.616)	(3.912.681.913)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>		<b>41.258.198.701</b>	<b>43.175.332.404</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>41.466.308.775</b>	<b>43.541.094.752</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>C.3</b>		
■ Utang Kepada Pihak Ketiga	C.3.1	26.504.802	75.859.737
■ Uang Muka dari KPPN	C.3.2	0	55.614.380
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		<b>26.504.802</b>	<b>131.474.117</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>26.504.802</b>	<b>131.474.117</b>
<b>EKUITAS</b>			
■ Ekuitas	C.4.1	41.439.803.973	43.409.620.635
<b>JUMLH EKUITAS</b>		<b>41.439.803.973</b>	<b>43.409.620.635</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>		<b>41.466.308.775</b>	<b>43.541.094.752</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.



## LAPORAN OPERASIONAL

**III. LAPORAN OPERASIONAL**

**PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI BARAT  
LAPORAN OPERASIONAL  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015**

(dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 DES 2016	31 DES 2015
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>D.1</b>		
<b>PENDAPATAN OPERASIONAL</b>	<b>D.1.1</b>		
■ Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1.1.1	52.904.476	4.265.649
<b>Jumlah Pendapatan Operasional (D.1.1.1)</b>	<b>D.1.1</b>	<b>52.904.476</b>	<b>4.265.649</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>	<b>D.1.2</b>		
■ Beban Pegawai	D.1.2.1	7.967.197.434	8.339.701.178
■ Beban Persediaan	D.1.2.2	169.194.611	178.899.575
■ Beban Barang dan Jasa	D.1.2.3	1.560.474.059	1.221.481.891
■ Beban Pemeliharaan	D.1.2.4	376.313.472	490.759.593
■ Beban Perjalanan Dinas	D.1.2.5	2.220.560.806	2.964.071.454
■ Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.1.2.6	2.268.293.669	2.456.482.586
<b>Jumlah Beban Operasional (D.1.2.1 s.d. D.1.2.6)</b>	<b>D.1.2</b>	<b>14.562.034.051</b>	<b>15.651.396.277</b>
<b>Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Operasional (D.1.1-D.1.2)</b>	<b>D.1</b>	<b>(14.509.129.575)</b>	<b>(15.647.130.628)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>D.2</b>		
<b>SURPLUS / (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA</b>	<b>D.2.1</b>		
■ Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.2.1.1	3.573.650	85.563
■ Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.2.1.2	2.018.663	-
<b>Jumlah Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya (D.2.1.1-D.2.1.2)</b>	<b>D.2.1</b>	<b>1.554.987</b>	<b>85.563</b>
<b>Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional (D.2.1)</b>	<b>D.2</b>	<b>1.554.987</b>	<b>85.563</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT) - LO (D.1+D.2)</b>		<b>(14.507.574.588)</b>	<b>(15.647.045.065)</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.



## LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

#### IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI BARAT  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015**

(dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 DES 2016	31 DES 2015
EKUITAS AWAL	E.1	43.409.620.635	43.546.483.391
SURPLUS/(DEFISIT) - LO	E.2	(14.507.574.588)	(15.355.544.778)
KOREKSI YANG MENAMBAH / (MENGURANGI) NILAI EKUITAS	E.3		
■ Penyesuaian Nilai Aset	E.3.1	-	3.880.285
■ Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.3.2	351.159.966	(319.283.006)
■ Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	E.3.3	-	-
<b>Jumlah Koreksi Yang Menambah/(Mengurangi) Nilai Ekuitas</b>		<b>351.159.966</b>	<b>(315.402.721)</b>
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4		
■ Ditagihkan ke Entitas Lain	E.4.1	12.242.942.436	15.860.944.042
■ Diterima dari Entitas Lain	E.4.2	(56.344.476)	(326.859.299)
<b>Jumlah Transaksi Antar Entitas</b>		<b>12.186.597.960</b>	<b>15.534.084.743</b>
<b>KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS (E.2+E.3+E.4)</b>		<b>(1.969.816.662)</b>	<b>(136.862.756)</b>
<b>EKUITAS AKHIR (E.1+E.2+E.3+E.4)</b>	<b>E.5</b>	<b>41.439.803.973</b>	<b>43.409.620.635</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.



## **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**



## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### *Profil dan Kebijakan Teknis*

#### A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah lembaga pemerintah non kementerian, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983, kemudian diperbarui dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas BPKP adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Sebagai aparat pengawasan internal pemerintah, BPKP berperan untuk membantu pemerintah dalam membangun pemerintahan yang baik dan bersih, membantu menghadapi permasalahan yang terjadi dan memberikan masukan/solusi. Penegasan jati diri sebagai pengawas internal pemerintah adalah dalam arti BPKP lebih mengedepankan peran proaktif untuk dapat memberikan nilai tambah kepada *stakeholder* dan *shareholder*. Dalam hal ini, BPKP berperan untuk meningkatkan proses *governance*, manajemen risiko dan penerapan sistem pengendalian guna mencapai tujuan nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan BPKP berperan dalam mendukung akuntabilitas Presiden dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Negara melalui fungsi pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Susunan organisasi dan pejabat pimpinan unit kerja di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:

🚩 Kepala Perwakilan	: Wasis Prabowo, S.E.,Ak.,MM
🚩 Kepala Bagian Tata Usaha	: Muh. Abdi Uluelang, S.E.,Ak.
🚩 Kepala Sub Bagian Keuangan	: Baden, S.E.,Ak.,M.Ak.,CA
🚩 Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	: Aryanto, S.Kom.,M.Ec.Dev
🚩 Koorwas Bidang IPP	: Baharuddin Rahman, S.E.
🚩 Koorwas Bidang APD	: Syamsul Aris, S.E.
🚩 Koorwas Bidang Akuntan Negara	: Putu Yudi Tenaya, Ak.,MM
🚩 Koorwas Bidang Investigasi	: Charles Rante Batara, S.E.,MM
🚩 Koorwas Bidang P3A & Pembinaan APIP	: Suan Kim, S.E.,MM

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan Keuangan*

## **A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan per 31 Desember 2016 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis Akuntansi*

**A.3. BASIS AKUNTANSI**

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar Pengukuran*

**A.4. DASAR PENGUKURAN**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan Akuntansi*

**A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat per 31 Desember 2016 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi

merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BPKP. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-LRA*

**(1) Pendapatan-LRA**

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-LO*

**(2) Pendapatan-LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Sewa Aset Tetap diakui secara proposional

antara nilai dan periode waktu sewa.

- Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakui pada saat ditetapkan surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Belanja*

**(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Beban*

**(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan .

**Aset****(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

**Aset Lancar****a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur secara handal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Tarif Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat	100%



	Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urutan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo dua belas (12) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan sebagai Bagian Lancar Tagihan TGR.
- Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian.

*Aset Tetap*

**b. Aset Tetap**

- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada

penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang BMN/BMD.

- Pengembalian belanja modal tahun anggaran yang lalu dicatat sebagai koreksi terhadap nilai aset yang bersangkutan pada saat pengembalian tersebut telah disetorkan ke Kas Negara.

*Penyusutan Aset Tetap*

**c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap Tanah, Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP), dan Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang Jangka Panjang*

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari dua belas (12) bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

*Aset Lainnya*

**e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu harga setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan

dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum table masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional pemerintahan, disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

#### Kewajiban

### (6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

#### a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima Dimuka, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. Pembelian Persediaan yang belum dibayar dari Kas Negara (belum terbit SP2D) diakui sebagai Belanja yang Masih Harus Dibayar pada tanggal Neraca.

**b. Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas (12) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Ekuitas*

**(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

**B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Selama periode berjalan, Pagu anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 sebesar Rp13.778.969.000,00. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-377/MK.02/2016 tanggal 13 Mei 2016, terdapat pengurangan pagu sebesar Rp182.761.000,00 sehingga pagu DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat menjadi sebesar Rp13.596.208.000,00

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan APBN Perubahan Tahun Anggaran 2016, terdapat pengurangan pagu anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat beserta revisi realokasi anggaran Rp890.000.000,00 sehingga pagu net DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat menjadi sebesar Rp12.706.208.000,00 (termasuk *self blocking* sebesar Rp125.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Belanja		Jumlah Anggaran (Rp)	
Kode	Uraian	Awal	Revisi
51	Belanja Pegawai	9.250.425.000	8.360.425.000
52	Belanja Barang	4.528.544.000	4.345.783.000
53	Belanja Modal	0	0
<b>Total</b>		<b>13.778.969.000</b>	<b>12.706.208.000</b>

Sedangkan apabila dilihat dari program, maka pagu belanja adalah sebagai berikut:

Uraian Program	Jumlah Pagu	
	Awal (Rp)	Revisi (Rp)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP	11.771.731.000	10.826.825.000
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP	2.007.238.000	1.879.383.000
<b>Total</b>	<b>13.778.969.000</b>	<b>12.706.208.000</b>



Realisasi Pendapatan  
Negara dan Hibah  
Rp56.344.476

### B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun 2016 adalah sebesar Rp56.344.476,00. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat tidak membuat Estimasi Pendapatan Negara Bukan Pajak dan Hibah TA 2016.

Realisasi PNBP Lainnya Tahun 2016 mengalami penurunan sebesar Rp270.514.823,00 atau minus 82,76 persen dibandingkan realisasi PNBP TA 2015 sebesar Rp326.859.299,00 yang disebabkan menurunnya pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan, dan pendapatan Iuran, Denda dan pendapatan lain-lain.

Perbandingan realisasi PNBP Tahun Anggaran 2016 dan 2015 disajikan pada Tabel 1 berikut ini:

**Tabel 1**  
**Perbandingan Realisasi PNBP Tahun 2016 dan 2015**

Uraian Jenis PNBP	Realisasi PNBP		Naik / (Turun)	
	TA 2016 (Rp)	TA 2015 (Rp)	Rp	%
Pendapatan Pemanfaatan BMN	421.500	623.583	(202.083)	(32,41)
Pendapatan Iuran dan Denda	52.482.976	3.642.066	48.840.910	1.341,02
Pendapatan Lain-Lain	3.440.000	322.593.650	(319.153.650)	(98,93)
<b>Jumlah Netto</b>	<b>56.344.476</b>	<b>326.859.299</b>	<b>(270.514.823)</b>	<b>(82,76)</b>

Realisasi Belanja  
Negara  
Rp12.242.436

### B.2. Belanja Negara

Realisasi belanja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 setelah dikurangi pengembalian belanja adalah sebesar Rp12.242.942.436,00 atau 96,35 persen dari anggaran sebesar Rp12.706.208.000,00.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja menurut program Tahun 2016 disajikan pada Tabel 2 berikut ini:

**Tabel 2**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program Tahun 2016**

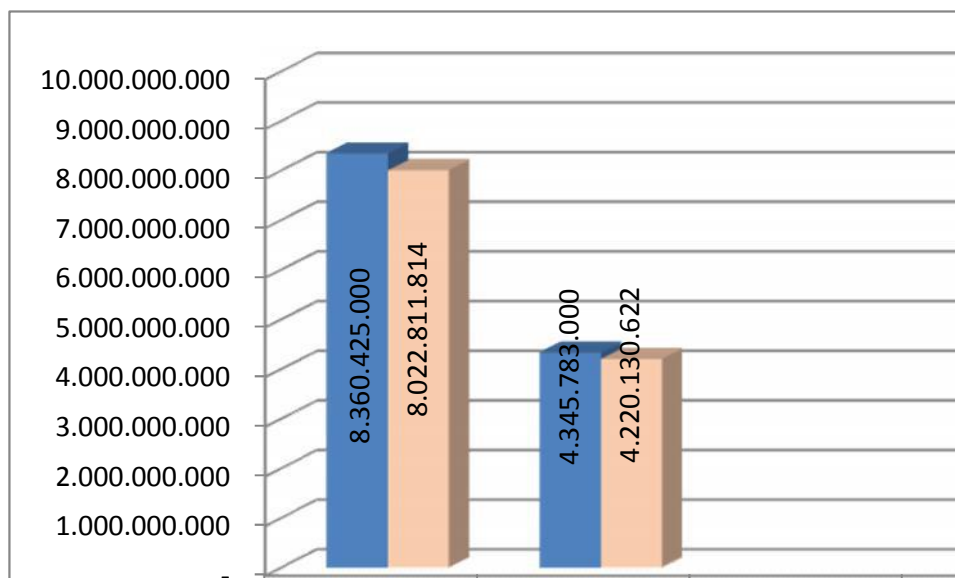
Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%tase
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP	10.826.825.000	10.428.802.962	96,32
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP	1.879.383.000	1.814.139.474	96,53
<b>Total</b>	<b>12.706.208.000</b>	<b>12.242.942.436</b>	<b>96,35</b>

Sedangkan menurut jenis belanja, anggaran dan realisasinya disajikan pada Tabel 3 di bawah ini:

**Tabel 3**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja Tahun 2016**

Jenis Belanja		Anggaran (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%tase
Kode	Uraian			
51	Belanja Pegawai	8.360.425.000	8.022.811.814	95,96
52	Belanja Barang	4.345.783.000	4.220.130.622	97,11
53	Belanja Modal	0	0	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>12.706.208.000</b>	<b>12.242.942.436</b>	<b>96,35</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja disajikan dalam grafik berikut ini:



Realisasi belanja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 mengalami penurunan sebesar Rp3.618.001.606,00 atau 22,81% dibandingkan realisasi belanja TA 2015 disebabkan tidak ada alokasi anggaran Belanja Modal dalam Tahun 2016. Perbandingan realisasi belanja Tahun 2016 dan 2015 disajikan pada Tabel 4 berikut ini:

**Tabel 4**  
**Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2016 dan 2015**

Jenis Belanja		Realisasi Belanja Netto (Rp)		Naik / (Turun)	
Kode	Uraian	TA 2016	TA 2015	Jumlah (Rp)	%tase
51	Belanja Pegawai	8.022.811.814	8.284.086.798	(261.274.984)	(3,15)
52	Belanja Barang	4.220.130.622	5.071.342.271	(851.211.649)	(16,78)
53	Belanja Modal	-	2.505.514.973	(2.505.514.973)	(100)
	<b>Jumlah</b>	<b>12.242.942.436</b>	<b>15.860.944.042</b>	<b>(3.618.001.606)</b>	<b>(22,81)</b>

*Belanja Pegawai*  
*Rp8.022.811.814*

#### **B.2.1. Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 dan 2015 setelah dikurangi pengembalian belanja masing-masing sebesar Rp8.022.811.814,00 dan Rp8.284.086.798,00.

Rincian anggaran dan Realisas Belanja Pegawai Tahun 2016 disajikan pada Tabel 5 berikut ini:

**Tabel 5**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2016**

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunj. PNS	3.781.671.000	3.636.860.816	96,17
Belanja Lembur	80.000.000	66.358.000	82,95
Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	4.498.754.000	4.319.592.998	96,02
<b>Realisasi Belanja Netto</b>	<b>8.360.425.000</b>	<b>8.022.811.814</b>	<b>95,96</b>

Realisasi belanja pegawai (*netto*) sebesar Rp8.022.811.814,00 berasal dari belanja pegawai (*bruto*) sebesar Rp8.041.114.989,00 setelah dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp18.303.175,00.

Dibandingkan dengan realisasi TA 2015, terdapat penurunan

realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp261.274.984,00 atau minus 3,15 persen disebabkan karena berkurangnya jumlah pegawai yang belum selesai melaksanakan pendidikan.

Perbandingan realisasi Belanja Pegawai Tahun 2016 dan 2015 disajikan pada Tabel 6 berikut ini:

**Tabel 6**  
**Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2016 dan 2015**

Uraian	Realisasi Netto (Rp)		Naik / (Turun)	
	TA 2016	TA 2015	Jumlah (Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunj. PNS	3.636.860.816	4.035.161.572	(398.300.756)	(9,87)
Belanja Lembur	66.358.000	80.000.000	(13.642.000)	(17,05)
Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	4.319.592.998	4.168.925.226	(29.332.228)	(0,70)
<b>Realisasi Belanja Bruto</b>	<b>8.022.811.814</b>	<b>8.284.086.798</b>	<b>(261.274.984)</b>	<b>(3,15)</b>

Belanja Barang  
Rp4.220.130.622

### B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 dan 2015 setelah dikurangi pengembalian belanja masing-masing sebesar Rp4.220.130.622,00 dan Rp5.071.342.271,00.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang Tahun 2016 disajikan pada Tabel 7 berikut ini:

**Tabel 7**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Tahun 2016**

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%tase
Belanja Barang Operasional	1.071.215.000	1.032.811.327	96,41
Belanja Barang Non Operasional	36.876.000	28.708.260	77,85
Belanja Barang Persediaan	69.505.000	65.974.230	94,92
Belanja Jasa	495.779.000	495.762.527	100,00
Belanja Pemeliharaan	396.315.000	376.313.472	94,95
Belanja Perj. Dalam Negeri	2.276.093.000	2.220.560.806	97,56
<b>Total</b>	<b>4.345.783.000</b>	<b>4.220.130.622</b>	<b>97,24</b>

Realisasi belanja barang (*netto*) sebesar Rp4.220.130.622,00 berasal dari belanja barang (*bruto*) sebesar Rp4.220.130.622,00 tanpa adanya pengembalian belanja.

Dibandingkan dengan realisasi TA 2015, terdapat penurunan realisasi Belanja Barang sebesar Rp851.211.649,00 atau 16,78 persen, antara lain disebabkan adanya penghematan Belanja Barang sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016.

Perbandingan realisasi Belanja Barang Tahun 2016 dan 2015 disajikan pada Tabel 8 berikut ini:

**Tabel 8**  
**Perbandingan Realisasi Belanja Barang Tahun 2016 dan 2015**

Uraian	Realisasi Netto		Naik / (Turun)	
	TA 2016	TA 2015	Jumlah Rp	%
Belanja Barang Operasional	1.032.811.327	737.488.148	295.323.179	40,04
Belanja Barang Non Operasional	28.708.260	18.227.500	10.480.760	57,50
Belanja Barang Persediaan	65.974.230	361.953.511	(295.979.281)	(81,77)
Belanja Jasa	495.762.527	481.585.265	14.177.262	2,94
Belanja Pemeliharaan	376.313.472	508.016.393	(131.702.921)	(25,92)
Belanja Perj. Dalam Negeri	2.220.560.806	2.964.071.454	(743.510.648)	(25,08)
<b>Total</b>	<b>4.220.130.622</b>	<b>5.071.342.271</b>	<b>(851.211.649)</b>	<b>(16,78)</b>

*Belanja Modal Rp0*

### B.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 dan 2015 setelah dikurangi pengembalian belanja masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp2.505.514.973,00.

Dibandingkan dengan realisasi TA 2015, terdapat penurunan realisasi Belanja Modal sebesar Rp2.505.514.973,00 atau 100,00 persen, antara lain disebabkan belanja modal yang sejak awal tidak dialokasikan untuk Tahun 2016.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2016 dan 2015 disajikan pada Tabel 9 berikut ini:

**Tabel 9**  
**Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2016 dan 2015**

Uraian	Realisasi Netto (Rp)		Naik / (Turun)	
	TA 2016	TA 2015	Jumlah (Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	1.514.764.973	(1.514.764.973)	(100,00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	551.300.000	(551.300.000)	(100,00)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	439.450.000	(439.450.000)	(100,00)
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>2.505.514.973</b>	<b>(2.505.514.973)</b>	<b>(100,00)</b>

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar  
Rp208.110.074

### C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp208.110.074,00 dan Rp365.762.348,00. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2016 dan 2015 disajikan pada Tabel 10 berikut ini:

**Tabel 10**  
**Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2016 dan 2015**

No.	Aset Lancar	31 Des 2016 (Rp)	31 Des 2015 (Rp)
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	55.614.380
2	Belanja Dibayar Dimuka ( <i>prepaid</i> )	48.382.500	45.315.000
3	Persediaan	159.727.574	264.832.968
	<b>Jumlah</b>	<b>208.110.074</b>	<b>365.762.348</b>

Kas di Bendahara  
Pengeluaran Rp0

#### C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp55.614.380,00. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat per 31 Desember 2016 dan 2015 disajikan pada Tabel 11 berikut ini:

**Tabel 11**  
**Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran  
per 31 Desember 2016 dan 2015**

No.	Aset Lancar	31 Des 2016 (Rp)	31 Des 2015 (Rp)
1	Kas Tunai	0,00	55.614.380
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>55.614.380</b>

Saldo Kas per 31 Desember 2015 telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 5 Januari 2016 dengan NTPN Nomor 0709021412010407.

Belanja Dibayar  
Dimuka (prepaid)  
Rp48.382.500

### C.1.2. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp48.382.500,00 dan Rp45.315.000,00. Saldo per 31 Desember 2016 merupakan sewa rumah dan mobil untuk keperluan dinas yang pembayarannya dilakukan pada tahun 2016. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per 31 Desember 2016 disajikan pada Tabel 12 berikut ini:

**Tabel 12**  
**Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per 31 Desember 2016**

No	Obyek Sewa	Jangka Waktu (Periode)	Nilai Sewa (Rp)	Beban Dimuka per 31 Desember 2016 (Rp)
1	Rumah Dinas	1 tahun (16/03/2016 s.d 15/03/2017)	25.000.000	6.250.000
2	Rumah Dinas	1 tahun (20/03/2016 s.d 19/03/2017)	25.000.000	6.250.000
3	Rumah Dinas	1 tahun (16/03/2016 s.d 15/03/2017)	25.000.000	6.250.000
4	Rumah Dinas	1 tahun (08/08/2016 s.d 07/08/2017)	18.890.000	11.019.170
5	Rumah Dinas	1 tahun (25/08/2016 s.d 24/08/2017)	16.670.000	11.113.330
6	Kendaraan Operasional	1 tahun (01/02/2016 s.d 31/01/2017)	90.000.000	7.500.000
<b>Jumlah</b>			<b>200.560.000</b>	<b>48.382.500</b>

Persediaan  
Rp159.727.574

### C.1.3. Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp159.727.574,00 dan Rp264.832.968,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional. Rincian Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015 disajikan pada Tabel 13 berikut ini:



**Tabel 13**  
**Rincian Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015**

Kode	Jenis Persediaan	31 Des 2016 (Rp)	31 Des 2015 (Rp)
117111	Barang Konsumsi	159.702.916	264.832.968
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	24.658	0
<b>Jumlah</b>		<b>159.727.574</b>	<b>264.832.968</b>

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

*Aset Tetap*  
*Rp41.258.198.701*

## C.2. Aset Tetap

Nilai buku Aset Tetap per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp41.258.198.701,00 dan Rp43.175.332.404,00, yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan digunakan dalam kegiatan operasional Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat.

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2016 dan 2015 disajikan pada Tabel 14 berikut ini:

**Tabel 14**  
**Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2016 dan 2015**

No.	Uraian	31 Des 2016 (Rp)	31 Des 2015 (Rp)
1	Tanah	2.042.703.750	2.042.703.750
2	Peralatan dan Mesin	6.232.014.285	6.232.014.285
3	Gedung dan Bangunan	34.520.500.913	34.520.500.913
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.292.795.369	4.292.795.369
<b>Nilai Perolehan</b>		<b>47.088.014.317</b>	<b>47.088.014.317</b>
Akumulasi Penyusutan		(5.829.815.616)	(3.912.681.913)
<b>Nilai Buku</b>		<b>41.258.198.701</b>	<b>43.175.332.404</b>

*Tanah*  
*Rp2.042.703.750*

### C.2.1. Tanah

Nilai perolehan Tanah per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp2.042.703.750,00. Sampai dengan 31 Desember 2016 tidak terdapat mutasi Tanah.

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2016 dapat dilihat pada Lampiran.

*Peralatan dan Mesin  
Rp6.232.014.285*

### **C.2.2. Peralatan dan Mesin**

Nilai perolehan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp6.232.014.285,00. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin s.d. 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp3.056.299.327,00, sehingga nilai buku Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp3.175.714.958,00. Sampai dengan 31 Desember 2016 tidak ada mutasi nilai perolehan Peralatan dan Mesin.

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 tersebut di atas tidak termasuk Peralatan dan Mesin yang dicatat secara Ekstrakomptabel sebesar Rp220.000,00.

*Gedung dan Bangunan  
Rp34.520.500.913*

### **C.2.3. Gedung dan Bangunan**

Nilai perolehan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016 dan 2015, masing-masing sebesar Rp34.520.500.913,00. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan s.d. 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp1.790.586.702,00, sehingga nilai buku Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp32.729.914.211,00.

Sampai dengan 31 Desember 2016 tidak ada mutasi nilai perolehan Gedung dan Bangunan.

*Jalan, Irigasi dan Jaringan  
Rp4.292.795.369*

### **C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Nilai perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp4.292.795.369,00. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan s.d. 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp982.929.587,00, sehingga nilai buku Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp3.309.865.782,00.

Sampai dengan 31 Desember 2016 tidak ada mutasi nilai perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan.

*Akumulasi Penyusutan Aset Tetap  
Rp5.829.815.616*

### **C.2.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp5.829.815.616,00 dan Rp3.912.681.913,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016 disajikan pada Tabel 15, berikut ini:

**Tabel 15**  
**Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016**

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Tanah	2.042.703.750	-	2.042.703.750
2	Peralatan dan Mesin	6.232.014.285	3.056.299.327	3.175.714.958
3	Gedung dan Bangunan	34.520.500.913	1.790.586.702	32.729.914.211
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.292.795.369	982.929.587	3.309.865.782
	<b>Jumlah</b>	<b>47.088.014.317</b>	<b>5.829.815.616</b>	<b>41.258.198.701</b>

Perbandingan mutasi akumulasi penyusutan dengan beban penyusutan per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo per 31/12/2015 (Rp)	Saldo per 31/12/2016 (Rp)	Mutasi (Rp)	Beban Penyusutan (Rp)	Selisih (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	1.879.091.055	3.056.299.327	1.177.208.272	1.184.697.223	(7.488.951)
2	Gedung dan Bangunan	1.443.833.106	1.790.586.702	346.753.596	690.424.610	(343.671.014)
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	589.757.752	982.929.587	393.171.835	393.171.836	(1)
	<b>Total</b>	<b>3.912.681.913</b>	<b>5.829.815.616</b>	<b>1.917.133.703</b>	<b>2.268.293.669</b>	<b>(351.159.966)</b>

Selisih tersebut merupakan normalisasi akumulasi penyusutan sehubungan dengan update aplikasi SIMAK BMN.

Kewajiban Jangka  
Pendek Rp26.504.802

### C.3. Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp26.504.802,00 dan Rp131.474.117,00. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Utang Kepada Pihak Ketiga	26.504.802,00
2	Uang Muka dari KPPN	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>26.504.802,00</b>

Utang Kepada Pihak  
Ketiga Rp26.504.802

#### C.3.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp26.504.802,00 dan Rp75.859.737,00. Jumlah Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2016 sebesar Rp26.504.802,00 tersebut terdiri dari Belanja Barang dan Jasa berupa tagihan rekening listrik Rp25.399.493,00 dan telepon Rp1.105.309,00 bulan Desember 2016.

Uang Muka dari  
KPPN Rp0

#### C.3.2. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp55.614.380,00.

Ekuitas  
Rp41.439.803.988

### C.4. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp41.439.803.988,00 dan Rp43.409.620.635,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Surplus/(Defisit) dari  
Kegiatan Operasional  
Rp14.509.129.560

## D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

### D.1. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional Tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar minus Rp14.509.129.560,00 dan minus Rp15.647.130.628,00. Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional Tahun 2016 tersebut merupakan selisih antara Pendapatan Operasional sebesar Rp52.904.476,00 dikurangi dengan Beban Operasional sebesar Rp14.562.034.036,00

Pendapatan  
Operasional  
Rp52.904.476

#### D.1.1. Pendapatan Operasional

Pendapatan Operasional Tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp52.904.476,00 dan Rp4.265.649,00. Jumlah tersebut seluruhnya merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pendapatan Negara  
Bukan Pajak-LO  
Rp52.904.476

##### D.1.1.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak-LO Tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp52.904.476,00 dan Rp4.265.649,00. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak-LO Tahun 2016 dan 2015 disajikan pada Tabel 16 berikut ini:

**Tabel 16**  
**Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak-LO**  
**Tahun 2016 dan 2015**

Uraian	Realisasi		Naik / (Turun)	
	Tahun 2016	Tahun 2015	Jumlah	%
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	421.500	623.583	(202.083)	(32,41)
Pendapatan Denda	52.482.976	3.642.066	48.840.910	1.341,02
<b>Jumlah</b>	<b>52.904.476</b>	<b>4.265.649</b>	<b>48.638.827</b>	<b>1.140,24</b>

Tidak terdapat selisih Pendapatan Operasional menurut Laporan Realisasi Anggaran dibandingkan dengan Laporan Operasional.

*Beban Operasional*  
Rp14.562.034.051

### D.1.2. Beban Operasional

Jumlah Beban Operasional pada Tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp14.562.034.051,00 dan Rp15.682.404.077,00. Jumlah tersebut merupakan realisasi beban yang terjadi dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional selama Tahun 2016. Rincian Beban Operasional disajikan pada Tabel 17 berikut ini:

**Tabel 17**  
**Rincian Beban Operasional Tahun 2016 dan 2015**

Uraian	Realisasi		Naik / (Turun)	
	Tahun 2016	Tahun 2015	Jumlah	%
Beban Pegawai	7.967.197.434	8.339.701.178	(372.503.744)	(4,47)
Beban Persediaan	169.194.611	178.899.575	(9.704.964)	(5,42)
Beban Barang dan Jasa	1.560.474.059	1.221.481.891	338.992.168	27,75
Beban Pemeliharaan	376.313.472	490.759.593	(114.446.121)	(23,32)
Beban Perjalanan Dinas	2.220.560.806	2.964.071.454	(743.510.648)	(25,08)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.268.293.669	2.456.482.586	(188.188.917)	(7,66)
<b>Jumlah</b>	<b>14.562.034.051</b>	<b>15.651.396.277</b>	<b>(1.089.362.226)</b>	<b>(69,60)</b>

*Beban Pegawai*  
Rp7.967.197.434

#### D.1.2.1 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp7.967.197.434,00 dan Rp8.339.701.178,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Rincian Beban Pegawai Tahun 2016 dan 2015 disajikan pada Tabel 18 berikut ini:

**Tabel 18**  
**Rincian Beban Pegawai Tahun 2016 dan 2015**

Uraian	Realisasi		Naik / (Turun)	
	Tahun 2016	Tahun 2015	Jumlah	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3.636.860.816	4.035.161.572	(398.300.756)	(9,87)
Belanja Lembur	66.358.000	80.000.000	(13.642.000)	(17,05)
Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	4.263.978.618	4.224.539.606	39.439.012	0,93
<b>Jumlah</b>	<b>7.967.197.434</b>	<b>8.339.701.178</b>	<b>(372.503.744)</b>	<b>(4,47)</b>

Jika realisasi tahun 2016 dibandingkan dengan realisasi menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih sebesar Rp55.614.380,00 sebagaimana disajikan pada Tabel 19 berikut ini:

**Tabel 19**  
**Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Pegawai Tahun 2016 Menurut LO dan LRA**

Uraian	Realisasi Menurut		Selisih (Rp)
	LO (Rp)	LRA (Rp)	
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3.636.860.816	3.636.860.816	0
Belanja Lembur	66.358.000	66.358.000	0
Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	4.263.978.618	4.319.592.998	55.614.380
<b>Jumlah</b>	<b>7.967.197.434</b>	<b>8.022.811.814</b>	<b>55.614.380</b>

Selisih realisasi sebesar Rp55.614.380,00 merupakan pembayaran tunjangan kinerja tahun 2016 atas beban tahun 2015.

*Beban Persediaan*  
*Rp169.194.611*

#### **D.1.2.2. Beban Persediaan**

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2016 dan 2015 masing-masing Rp169.194.611,00 dan Rp178.899.575,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat pemakaian/konsumsi atas barang-barang yang habis pakai.

Rincian Beban Persediaan Tahun 2016 dan 2015 disajikan pada Tabel 20 berikut ini:

**Tabel 20**  
**Rincian Beban Persediaan Tahun 2016 dan 2015**

Uraian	Realisasi		Naik / (Turun)	
	Tahun 2016	Tahun 2015	Jumlah	%
Beban Persediaan Konsumsi	169.194.611	178.899.575	(9.704.964)	(5,42)
<b>Jumlah</b>	<b>169.194.611</b>	<b>178.899.575</b>	<b>(9.704.964)</b>	<b>(5,42)</b>

Realisasi Belanja Persediaan (netto) Tahun 2016 menurut Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp65.974.230,00, sedangkan menurut Laporan Operasional sebesar Rp169.194.611,00. Perbedaan tersebut disebabkan Belanja Persediaan dicatat sebagai perolehan Persediaan di Neraca, sedangkan Beban Persediaan merupakan pemakaian Persediaan selama tahun 2016.

*Beban Barang dan  
Jasa Rp1.560.474.059*

#### **D.1.2.3. Beban Barang dan Jasa**

Jumlah Beban Barang dan Jasa pada Tahun 2016 dan 2015 masing-masing Rp1.560.474.059,00 dan Rp1.221.481.891,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Rincian Beban Barang dan Jasa disajikan pada Tabel 21 berikut ini:

**Tabel 21**  
**Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2016 dan 2015**

Uraian	Realisasi		Naik / (Turun)	
	Tahun 2016	Tahun 2015	Jumlah	%
Beban Barang Operasional	1.032.811.327	732.417.648	300.393.679	41,01
Beban Barang Non Operasional	28.708.260	9.870.000	18.838.260	190,86
Beban Jasa	498.954.472	479.194.243	19.760.229	4,12
<b>Jumlah</b>	<b>1.560.474.059</b>	<b>1.221.481.891</b>	<b>338.992.168</b>	<b>27,75</b>

Jika realisasi tahun 2016 dibandingkan dengan realisasi menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih sebesar Rp3.191.930,00 sebagaimana disajikan pada Tabel 22 berikut ini:



**Tabel 22**  
**Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Barang dan Jasa Tahun 2016**  
**Menurut LO dan LRA**

Uraian	Realisasi Menurut		Selisih (Rp)
	LO (Rp)	LRA (Rp)	
Beban Barang Operasional	1.032.811.327	1.032.811.327	-
Beban Barang Non Operasional	28.708.260	28.708.260	-
Beban Jasa	498.954.472	495.762.527	3.191.945
<b>Jumlah</b>	<b>1.560.474.059</b>	<b>1.557.282.114</b>	<b>3.191.945</b>

Selisih realisasi Beban Jasa sebesar Rp3.191.945,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Uraian	Realisasi
Pembayaran langganan daya dan jasa tahun 2016 atas beban yang terutang tahun 2015	(20.245.357)
Beban langganan daya dan jasa tahun 2016 yang belum dibayarkan	26.504.802
Pembayaran biaya sewa tahun 2015 untuk masa pemakaian melewati tahun 2015	45.315.000
Pembayaran biaya sewa tahun 2016 untuk masa pemakaian melewati tahun 2016	(48.382.500)
<b>Jumlah</b>	<b>3.191.945</b>

*Beban  
Pemeliharaan  
Rp376.313.472*

#### **D.1.2.4. Beban Pemeliharaan**

Jumlah Beban Pemeliharaan pada Tahun 2016 dan 2015 masing-masing Rp376.313.472,00 dan Rp490.759.593,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap dan aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2016 dan 2015 disajikan pada Tabel 23 berikut ini:

**Tabel 23**  
**Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2016 dan 2015**

Uraian	Realisasi		Naik / (Turun)	
	Tahun 2016	Tahun 2015	Jumlah	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	306.514.800	389.358.650	(82.843.850)	(21,28)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	69.798.672	101.400.943	(31.602.271)	(31,17)
<b>Jumlah</b>	<b>376.313.472</b>	<b>490.759.593</b>	<b>114.446.121</b>	<b>23,32</b>

Tidak terdapat selisih Belanja Pemeliharaan menurut Laporan Realisasi Anggaran dibandingkan dengan Laporan Operasional.

#### D.1.2.5. Beban Perjalanan Dinas

*Beban Perjalanan Dinas*  
Rp2.220.560.806

Jumlah Beban Perjalanan Dinas pada Tahun 2016 dan 2015 masing-masing Rp2.220.560.806,00 dan Rp2.964.071.454,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas disajikan pada Tabel 24 berikut ini:

**Tabel 24**  
**Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2016 dan 2015**

Uraian	Realisasi		Naik / (Turun)	
	Tahun 2016	Tahun 2015	Jumlah	%
Beban Perjalanan Biasa	2.152.830.806	2.905.221.454	(752.390.648)	(25,90)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	37.730.000	58.850.000	(21.120.000)	(35,89)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	30.000.000	0	30.000.000	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.220.560.806</b>	<b>2.964.071.454</b>	<b>(743.510.648)</b>	<b>(25,08)</b>

Tidak terdapat selisih Belanja Perjalanan Dinas menurut Laporan Realisasi Anggaran dibandingkan dengan Laporan Operasional.

#### D.1.2.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban Penyusutan dan Amortisasi*  
Rp2.268.293.669

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Tahun 2016 dan 2015 masing-masing Rp2.268.293.669,00 dan

Rp2.456.482.586,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2016 dan 2015 disajikan pada Tabel 25 berikut ini:

**Tabel 25**  
**Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi**  
**Tahun 2016 dan 2015**

Uraian	Realisasi		Naik / (Turun)	
	Tahun 2016	Tahun 2015	Jumlah	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.184.697.223	1.024.424.355	160.272.868	15,65
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	690.424.610	1.038.886.396	(348.461.786)	(33,54)
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	393.171.836	393.171.839	(3)	(0,00)
<b>Jumlah</b>	<b>2.268.293.669</b>	<b>2.456.482.586</b>	<b>(188.188.917)</b>	<b>(7,66)</b>

*Surplus/(Defisit)  
dari Kegiatan Non  
Operasional  
Rp1.554.987*

## **D.2. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional**

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional pada Tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp1.554.987,00 dan Rp85.563,00. Jumlah tersebut merupakan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp1.554.987,00.

*Surplus/(Defisit)  
dari Kegiatan Non  
Operasional  
Lainnya Rp1.554.987*

### **D.2.1. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya**

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp1.554.987,00 dan Rp85.563,00. Jumlah tersebut merupakan selisih antara Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp3.573.650,00 dikurangi Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp2.018.663,00.

*Pendapatan dari  
Kegiatan Non  
Operasional  
Lainnya Rp3.573.650*

#### **D.2.1.1. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya**

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp3.573.650,00 dan Rp85.563,00.

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya disajikan pada Tabel 26 berikut ini:

**Tabel 26**  
**Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya**  
**Tahun 2016 dan 2015**

Uraian	Realisasi		Naik / (Turun)	
	Tahun 2016	Tahun 2015	Jumlah	%
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	3.440.000	85.563	3.354.437	3.920,43
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	133.650	0	133.650	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.573.650</b>	<b>85.563</b>	<b>3.488.087</b>	<b>4.076,63</b>

Jika realisasi tahun 2016 dibandingkan dengan realisasi menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih sebesar Rp133.650,00 sebagaimana disajikan pada Tabel 27 berikut ini:

**Tabel 27**  
**Perbandingan Realisasi Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya**  
**Tahun 2016 Menurut LO dan LRA**

Uraian	Realisasi Menurut		Selisih (Rp)
	LO (Rp)	LRA (Rp)	
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	3.440.000	3.440.000	-
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	133.650	-	133.650
<b>Jumlah</b>	<b>3.573.650</b>	<b>3.440.000</b>	<b>133.650</b>

Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan merupakan selisih lebih nilai persediaan pada setiap akhir bulan dibandingkan dengan nilai menurut pembukuan, sehubungan dengan kebijakan akuntansi yang menggunakan harga terakhir untuk mencatat nilai persediaan.

Beban dari Kegiatan  
Non Operasional  
Lainnya Rp2.018.663

#### D.2.1.2. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp2.018.663,00 dan Rp0,00

Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya disajikan pada Tabel 28 berikut ini:

**Tabel 28**  
**Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya**  
**Tahun 2016 dan 2015**

Uraian	Realisasi		Naik / (Turun)	
	Tahun 2016	Tahun 2015	Jumlah	%
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	2.018.663	-	2.018.663	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.018.663</b>	<b>-</b>	<b>2.018.663</b>	<b>0,00</b>

Beban Penyesuaian Nilai Persediaan merupakan selisih nilai kurang nilai persediaan pada setiap akhir bulan dibandingkan dengan nilai menurut pembukuan, sehubungan dengan kebijakan akuntansi yang menggunakan

## E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal*  
*Rp43.409.620.635*

### E.1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp43.409.620.635,00 dan Rp43.546.483.391,00.

*Surplus/(Defisit) LO*  
*(Rp14.507.574.588)*

### E.2. Surplus/(Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar minus Rp14.507.574.588,00 dan minus Rp15.355.544.778,00. Jumlah tersebut merupakan selisih kurang pendapatan dibandingkan dengan beban sebagaimana telah dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional.

*Koreksi Yang Menambah/(Mengurangi) Nilai Ekuitas*  
*Rp351.159.966*

### E.3. Koreksi Yang Menambah/(Mengurangi) Nilai Ekuitas

Jumlah Koreksi Yang Menambah / (Mengurangi) Nilai Ekuitas per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp351.159.966,00 dan Rp(315.402.721,00). Jumlah per 31 Desember 2016 tersebut terdiri atas:

Uraian	Jumlah 31 Des 2016 (Rp)	Jumlah 31 Des 2015 (Rp)
Penyesuaian Nilai Aset	-	3.880.285
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	351.159.966	(319.283.006)
<b>Total</b>	<b>351.159.966</b>	<b>(315.402.721)</b>

*Penyesuaian Nilai Aset*  
*Rp0*

#### E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp3.880.285,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai perolehan persediaan akibat penerapan kebijakan akuntansi, yaitu persediaan dinilai dengan menggunakan harga pembelian/perolehan terakhir. Pada tahun 2015, penyesuaian nilai persediaan diakui sebagai koreksi nilai ekuitas, sedangkan pada tahun 2016 diakui sebagai bagian dari surplus/(defisit) LO.

Koreksi Nilai Aset  
Tetap Non  
Revaluasi  
Rp351.159.966

### E.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2016 merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan nilai buku aset sehubungan normalisasi perhitungan akumulasi penyusutan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Peralatan dan Mesin	(7.488.951)
Gedung dan Bangunan	(343.671.014)
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(1)
<b>Total</b>	<b>(351.159.966)</b>

Transaksi Antar  
Entitas  
Rp12.186.597.960

### E.4. Transaksi Antar Entitas

Jumlah Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp12.186.597.960,00 dan Rp15.534.084.743,00.

Jumlah Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2016 terdiri atas:

Uraian	31 Des 2016	31 Des 2015
Ditagihkan ke Entitas Lain	12.242.942.436	15.860.944.042
Diterima dari Entitas Lain	(56.344.476)	(326.859.299_
<b>Jumlah</b>	<b>12.186.597.960</b>	<b>15.534.084.743</b>

Ditagihkan ke  
Entitas Lain  
Rp12.242.942.436

#### E.4.1. Ditagihkan ke Entitas Lain

Jumlah Ditagihkan ke Entitas Lain per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp12.242.942.436,00 dan Rp15.860.944.042,00. Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja yang telah diterima pembayarannya dari Kas Negara pada tanggal neraca setelah dikurangi pengembalian belanja s.d. 31 Desember 2016.

Diterima dari  
Entitas Lain  
Rp56.344.476

#### E.4.2. Diterima dari Entitas Lain

Jumlah Diterima dari Entitas Lain per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp56.344.476,00 dan Rp326.859.299,00. Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan Negara yang telah disetorkan ke Kas Negara setelah dikurangi pengembalian penerimaan Negara s.d. 31 Desember 2016.

*Ekuitas Akhir*  
*Rp41.439.803.973*

#### **E.5. Ekuitas Akhir**

Jumlah Ekuitas per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp41.439.803.973,00 dan Rp43.409.620.635,00. Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2016 merupakan kekayaan bersih pada tanggal neraca yaitu selisih antara nilai Aset sebesar Rp41.466.308.775,00 dikurangi nilai Kewajiban sebesar Rp26.504.802,00



**Informasi Penting Lainnya**

Informasi Dana Penugasan Beban Mitra Kerja

**F. INFORMASI PENTING LAINNYA****Informasi Dana Penugasan Beban Mitra Kerja**

Selama tahun 2016 kegiatan pengawasan di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat selain didanai dari DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat, juga didanai dari mitra kerja. Kegiatan tersebut berupa pendampingan, bimbingan teknis dan sosialisasi berdasarkan permintaan dari kementerian/lembaga, dan BUMN/BUMD/ BLU yang menjadi mitra kerja di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 jumlah penugasan yang dibiayai dari dana mitra kerja sebanyak 45 PP dan telah menghasilkan 45 LHP, dan realisasi dana penugasan beban mitra kerja sebesar Rp798.227.582.455,00 dengan rincian sebagai berikut:

Kedeputan	PKP2T			Non PKP2T		
	PP	LHP	Dana	PP	LHP	Dana
Perekonomian	1	1	9.095.502	6	6	53.111.309
Polhukam dan PMK	5	5	58.182.000	15	15	165.102.347
Keuangan Daerah	-	-	-	18	18	513.030.000
Jumlah	6	6	67.277.502	39	39	731.243.656

Jumlah dana tersebut seluruhnya dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh pihak mitra kerja sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada masing-masing mitra kerja. Pegawai BPKP yang diberi tugas oleh pimpinan unit masing-masing diterbitkan Surat Perintah Dinas (SPD) Nihil dengan beban anggaran mitra kerja, dan pada akhir kegiatan/penugasan pegawai dimaksud menerima dan menandatangani kuitansi penggantian biaya perjalanan dinas/transport lokal, dan selanjutnya dipertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada masing-masing mitra kerja.



## **LAPORAN KEUANGAN POKOK**

- ❖ **NERACA SALDO AWAL**
- ❖ **NERACA PERCOBAAN BASIS KAS**
- ❖ **NERACA PERCOBAAN BASIS AKRUAL**
- ❖ **LAPORAN REALISASI ANGGARAN**
- ❖ **NERACA**
- ❖ **LAPORAN OPERASIONAL**
- ❖ **LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**NERACA PERCOBAAN  
TINGKAT SATUAN KERJA  
SALDO AWAL TAHUN 2016  
( DALAM RUPIAH )**

Kode Laporan:  
Tanggal : 05-04-17  
Halaman : 1

**KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**  
**ESELON I : 01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**  
**WILAYAH/PROPINSI : 3400 PROP. SULAWESI BARAT**  
**SATUAN KERJA : 689266 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI BARAT**

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	55,614,380	
0	114112	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	45,315,000	
0	117111	Barang Konsumsi	264,832,968	
0	131111	Tanah	2,042,703,750	
0	132111	Peralatan dan Mesin	6,232,014,285	
0	133111	Gedung dan Bangunan	34,520,500,913	
0	134111	Jalan dan Jembatan	1,137,295,928	
0	134113	Jaringan	3,155,499,441	
0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		1,879,091,055
0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		1,443,833,106
0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan		170,594,388
0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan		419,163,364
0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar		55,614,380
0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar		20,245,357
0	219511	Uang Muka dari KPPN		55,614,380
0	391111	Ekuitas		43,409,620,635
		<b>J U M L A H</b>	<b>47,453,776,665</b>	<b>47,453,776,665</b>

**NERACA PERCOBAAN  
TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 31 DESEMBER 2016  
( DALAM RUPIAH )**

Kode Laporan: NPSAIKT  
Tanggal : 05-04-17  
Halaman : 1

**KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**  
**ESELON I : 01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**  
**WILAYAH/PROPINSI : 3400 PROP. SULAWESI BARAT**  
**SATUAN KERJA : 689266 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI BARAT**

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0	115612	Piutang dari KPPN	463,265,564	
0	219711	Utang Kepada KUN	56,344,476	
2	511111	Allotment Belanja Gaji Pokok PNS		2,604,844,000
2	511119	Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS		46,000
2	511121	Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS		163,626,000
2	511122	Allotment Belanja Tunj. Anak PNS		49,951,000
2	511123	Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS		74,560,000
2	511124	Allotment Belanja Tunj. Fungsional PNS		362,860,000
2	511125	Allotment Belanja Tunj. PPh PNS		49,698,000
2	511126	Allotment Belanja Tunj. Beras PNS		125,676,000
2	511129	Allotment Belanja Uang Makan PNS		334,460,000
2	511151	Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS		15,950,000
2	512211	Allotment Belanja Uang Lembur		80,000,000
2	512411	Allotment Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)		4,498,754,000
2	521111	Allotment Belanja Keperluan Perkantoran		846,399,000
2	521114	Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat		30,892,000
2	521115	Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja		158,100,000
2	521119	Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya		35,824,000
2	521211	Allotment Belanja Bahan		24,356,000
2	521213	Allotment Belanja Honor Output Kegiatan		12,520,000
2	521811	Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi		69,505,000
2	522111	Allotment Belanja Langganan Listrik		266,755,000
2	522112	Allotment Belanja Langganan Telepon		17,214,000
2	522141	Allotment Belanja Sewa		200,560,000
2	522151	Allotment Belanja Jasa Profesi		11,250,000
2	523111	Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		316,516,000
2	523121	Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		79,799,000
2	524111	Allotment Belanja Perjalanan Biasa		2,203,618,000
2	524113	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		42,475,000
2	524114	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		30,000,000
3	423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan		421,500
3	423752	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah		52,482,976
3	423951	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu		3,440,000
3	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	2,544,299,860	
3	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	41,121	

**NERACA PERCOBAAN  
TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 31 DESEMBER 2016  
( DALAM RUPIAH )**

Kode Laporan: NPSAIKT  
Tanggal : 05-04-17  
Halaman : 2

**KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**  
**ESELON I : 01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**  
**WILAYAH/PROPINSI : 3400 PROP. SULAWESI BARAT**  
**SATUAN KERJA : 689266 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI BARAT**

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS		1,301
3	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	155,804,390	
3	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	44,020,590	
3	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	72,670,000	
3	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	361,850,000	
3	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS		450,000
3	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	44,564,656	
3	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	114,061,500	
3	511129	Belanja Uang Makan PNS	290,570,000	
3	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	10,540,000	
3	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS		1,110,000
3	512211	Belanja Uang Lembur	79,994,000	
3	512211	Pengembalian Belanja Uang Lembur		13,636,000
3	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	4,322,698,872	
3	512411	Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)		3,105,874
3	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	817,996,618	
3	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	30,891,609	
3	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	158,100,000	
3	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	25,823,100	
3	521211	Belanja Bahan	17,788,260	
3	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	10,920,000	
3	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	65,974,230	
3	522111	Belanja Langganan Listrik	266,754,895	
3	522112	Belanja Langganan Telepon	17,197,632	
3	522141	Belanja Sewa	200,560,000	
3	522151	Belanja Jasa Profesi	11,250,000	
3	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	306,514,800	
3	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	69,798,672	
3	524111	Belanja Perjalanan Biasa	2,152,830,806	
3	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	37,730,000	
3	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	30,000,000	
		<b>J U M L A H</b>	<b>12,780,855,651</b>	<b>12,780,855,651</b>

**NERACA PERCOBAAN  
TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 31 DESEMBER 2016  
( DALAM RUPIAH )**

Kode Laporan: NPSAIKT  
Tanggal : 05-04-17  
Halaman : 1

**KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**  
**ESELON I : 01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**  
**WILAYAH/PROPINSI : 3400 PROP. SULAWESI BARAT**  
**SATUAN KERJA : 689266 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI BARAT**

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0	114112	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	48,382,500	
0	117111	Barang Konsumsi	159,702,916	
0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	24,658	
0	131111	Tanah	2,042,703,750	
0	132111	Peralatan dan Mesin	6,232,014,285	
0	133111	Gedung dan Bangunan	34,520,500,913	
0	134111	Jalan dan Jembatan	1,137,295,928	
0	134113	Jaringan	3,155,499,441	
0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		3,056,299,327
0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		1,790,586,702
0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan		284,323,981
0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan		698,605,606
0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar		26,504,802
0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		12,242,942,436
0	313121	Diterima dari Entitas Lain	56,344,476	
0	391111	Ekuitas		43,409,620,635
0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		351,159,966
3	423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan		421,500
3	423752	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah		52,482,976
3	423951	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu		3,440,000
3	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan		133,650
3	511111	Beban Gaji Pokok PNS	2,544,299,860	
3	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	41,121	
3	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS		1,301
3	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	155,804,390	
3	511122	Beban Tunj. Anak PNS	44,020,590	
3	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	72,670,000	
3	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	361,850,000	
3	511124	Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS		450,000
3	511125	Beban Tunj. PPh PNS	44,564,656	
3	511126	Beban Tunj. Beras PNS	114,061,500	
3	511129	Beban Uang Makan PNS	290,570,000	
3	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	10,540,000	
3	511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS		1,110,000
3	512211	Beban Uang Lembur	79,994,000	

**NERACA PERCOBAAN  
TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 31 DESEMBER 2016  
( DALAM RUPIAH )**

Kode Laporan: NPSAIKT  
Tanggal : 05-04-17  
Halaman : 2

**KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**  
**ESELON I : 01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**  
**WILAYAH/PROPINSI : 3400 PROP. SULAWESI BARAT**  
**SATUAN KERJA : 689266 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI BARAT**

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3	512211	Pengembalian Beban Uang Lembur		13,636,000
3	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	4,267,084,492	
3	512411	Pengembalian Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)		3,105,874
3	521111	Beban Keperluan Perkantoran	817,996,618	
3	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	30,891,609	
3	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	158,100,000	
3	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	25,823,100	
3	521211	Beban Bahan	17,788,260	
3	521213	Beban Honor Output Kegiatan	10,920,000	
3	522111	Beban Langganan Listrik	272,242,704	
3	522112	Beban Langganan Telepon	17,969,268	
3	522141	Beban Sewa	197,492,500	
3	522151	Beban Jasa Profesi	11,250,000	
3	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	306,514,800	
3	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	69,798,672	
3	524111	Beban Perjalanan Biasa	2,152,830,806	
3	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	37,730,000	
3	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	30,000,000	
3	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1,184,697,223	
3	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	690,424,610	
3	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	113,729,593	
3	591313	Beban Penyusutan Jaringan	279,442,243	
3	593111	Beban Persediaan konsumsi	169,194,611	
3	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	2,018,663	
		<b>J U M L A H</b>	<b>61,934,824,756</b>	<b>61,934,824,756</b>

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015  
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
ESELON I : 01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
WILAYAH/PROPINSI : 3400 PROP. SULAWESI BARAT  
SATUAN KERJA : 689266 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI BARAT  
JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRAST  
Tanggal : Wednesday, April  
Halaman : 1  
Prog.Id : lu\_pastkt

No	URAIAN	2016				2015			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH</b>								
A.1.1	PENERIMAAN NEGARA	0	56,344,476	56,344,476	0.00	0	326,859,299	326,859,299	0.00
A.1.1.a	Penerimaan Perpajakan	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
A.1.1.b	Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	56,344,476	56,344,476	0.00	0	326,859,299	326,859,299	0.00
A.1.2	HIBAH	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A.I + A. II)</b>	0	56,344,476	56,344,476	0.00	0	326,859,299	326,859,299	0.00
<b>B</b>	<b>BELANJA NEGARA</b>								
B.1.1	Rupiah Murni	12,706,208,000	12,242,942,436	( 463,265,564)	96.35	16,678,100,000	15,860,944,042	( 817,155,958)	95.10
B.1.1.a	Belanja Pegawai	8,360,425,000	8,022,811,814	( 337,613,186)	95.96	9,020,584,000	8,284,086,798	( 736,497,202)	91.84
B.1.1.b	Belanja Barang	4,345,783,000	4,220,130,622	( 125,652,378)	97.11	5,116,273,000	5,071,342,271	( 44,930,729)	99.12
B.1.1.c	Belanja Modal	0	0	0	0.00	2,541,243,000	2,505,514,973	( 35,728,027)	98.59
B.1.1.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.1.e	Subsidi	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.1.f	Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.1.g	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.1.h	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2	Pinjaman dan Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.a	Belanja Pegawai	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.b	Belanja Barang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.c	Belanja Modal	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.e	Subsidi	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.f	Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.g	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.h	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	<b>JUMLAH BELANJA (B.I + B. II)</b>	12,706,208,000	12,242,942,436	( 463,265,564)	96.35	16,678,100,000	15,860,944,042	( 817,155,958)	95.10
<b>C</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>								
C.I	PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.I.1	Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.I.2	Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.II	PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015  
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
ESELON I : 01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
WILAYAH/PROPINSI : 3400 PROP. SULAWESI BARAT  
SATUAN KERJA : 689266 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI BARAT  
JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRAST  
Tanggal : Wednesday, April  
Halaman : 2  
Prog.Id : lu\_pastkt

No	URAIAN	2016				2015			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C.II.1	Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.II.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	JUMLAH PEMBIAYAAN (C.1 +C.2)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00

Mamuju, 23 Maret 2017

Kepala Perwakilan



Wasis Prabowo

NIP 196510311987031001

**NERACA**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015**  
**(DALAM RUPIAH)**

Kode Laporan : NSAIE1T  
Tanggal : 05/04/17  
Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
UNIT ORGANISASI : 01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
WILAYAH/PROPINSI : 3400 PROP. SULAWESI BARAT  
SATUAN KERJA : 689266 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI BARAT

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2016	2015	Jumlah	%
1	2	3	4	5
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	55,614,380	( 55,614,380)	( 100.00)
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	48,382,500	45,315,000	3,067,500	6.76
Persediaan	159,727,574	264,832,968	( 105,105,394)	( 39.68)
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>208,110,074</b>	<b>365,762,348</b>	<b>( 157,652,274)</b>	<b>( 43.10)</b>
<b>ASET TETAP</b>				
Tanah	2,042,703,750	2,042,703,750	0	0.00
Peralatan dan Mesin	6,232,014,285	6,232,014,285	0	0.00
Gedung dan Bangunan	34,520,500,913	34,520,500,913	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	4,292,795,369	4,292,795,369	0	0.00
Akumulasi Penyusutan	( 5,829,815,616)	( 3,912,681,913)	( 1,917,133,703)	48.99
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>41,258,198,701</b>	<b>43,175,332,404</b>	<b>( 1,917,133,703)</b>	<b>( 4.44)</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>41,466,308,775</b>	<b>43,541,094,752</b>	<b>( 2,074,785,977)</b>	<b>( 4.76)</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
Utang kepada Pihak Ketiga	26,504,802	75,859,737	( 49,354,935)	( 65.06)
Uang Muka dari KPPN	0	55,614,380	( 55,614,380)	( 100.00)
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>26,504,802</b>	<b>131,474,117</b>	<b>( 104,969,315)</b>	<b>( 79.84)</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>26,504,802</b>	<b>131,474,117</b>	<b>( 104,969,315)</b>	<b>( 79.84)</b>
<b>EKUITAS</b>				
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas	41,439,803,973	43,409,620,635	( 1,969,816,662)	( 4.53)
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>41,439,803,973</b>	<b>43,409,620,635</b>	<b>( 1,969,816,662)</b>	<b>( 4.53)</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>41,466,308,775</b>	<b>43,541,094,752</b>	<b>( 2,074,785,977)</b>	<b>( 4.76)</b>

Mamuju, 23 Maret 2017

Kepala Perwakilan



**LAPORAN OPERASIONAL  
TINGKAT SATUAN KERJA**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2016 DAN 2015  
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
UNIT ORGANISASI : 01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
WILAYAH/PROPINSI : 3400 PROP. SULAWESI BARAT  
SATUAN KERJA : 689266 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI BARAT

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2016	2015	Jumlah	%
1	2	3	4	5
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>				
<b>PENDAPATAN OPERASIONAL</b>				
<b>PENDAPATAN PERPAJAKAN</b>				
Pendapatan Pajak Penghasilan				
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah				
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan				
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan				
Pendapatan Cukai				
Pendapatan Pajak Lainnya				
Pendapatan Bea Masuk				
Pendapatan Bea Keluar				
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0.00
<b>PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>				
Pendapatan Sumber Daya Alam				
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba				
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya				
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	52,904,476	4,265,649	48,638,827	1,140.24
<b>PENDAPATAN HIBAH</b>				
Pendapatan Hibah				
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	0.00
<b>JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>				
<b>Beban Pegawai</b>				
<b>Beban Persediaan</b>				
<b>Beban Barang dan Jasa</b>				
521113 Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	0	5,070,500	( 5,070,500)	( 100.00)
521219 Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	8,357,500	( 8,357,500)	( 100.00)
522113 Beban Langganan Air	0	323,000	( 323,000)	( 100.00)
Jumlah Beban Barang dan Jasa	0	13,751,000	( 323,000)	( 300.00)
<b>Beban Pemeliharaan</b>				
593113 Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0	17,256,800	( 17,256,800)	( 100.00)
Jumlah Beban Pemeliharaan	0	17,256,800	( 17,256,800)	( 100.00)
<b>Beban Perjalanan Dinas</b>				
<b>Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat</b>				
<b>Beban Bunga</b>				
<b>Beban Subsidi</b>				
<b>Beban Hibah</b>				

**LAPORAN OPERASIONAL  
TINGKAT SATUAN KERJA**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2016 DAN 2015  
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
UNIT ORGANISASI : 01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
WILAYAH/PROPINSI : 3400 PROP. SULAWESI BARAT  
SATUAN KERJA : 689266 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI BARAT

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2016	2015	Jumlah	%
1	2	3	4	5
Beban Bantuan Sosial				
Beban Penyusutan dan Amortisasi				
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih				
Beban Transfer				
Beban Lain-Lain				
<b>JUMLAH BEBAN OPERASIONAL</b>	<b>0</b>	<b>31,007,800</b>	<b>( 31,007,800)</b>	<b>( 400.00)</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>0</b>	<b>( 31,007,800)</b>	<b>31,007,800</b>	<b>400.00</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>				
<b>SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR</b>				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar				
Beban Pelepasan Aset Non Lancar				
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0.00
<b>SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>				
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
Jumlah Surplus/(defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0.00
<b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA</b>				
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
423953 Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	322,508,087	( 322,508,087)	100.00
Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	322,508,087	( 322,508,087)	100.00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,554,987	322,593,650	( 321,038,663)	( 99.51)
<b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>322,508,087</b>	<b>( 322,508,087)</b>	<b>100.00</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>				
Beban Luar Biasa				
<b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>				
<b>PENDAPATAN OPERASIONAL</b>				
<b>PENDAPATAN PERPAJAKAN</b>				

**LAPORAN OPERASIONAL  
TINGKAT SATUAN KERJA**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2016 DAN 2015  
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
 UNIT ORGANISASI : 01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
 WILAYAH/PROPINSI : 3400 PROP. SULAWESI BARAT  
 SATUAN KERJA : 689266 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI BARAT

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2016	2015	Jumlah	%
1	2	3	4	5
Pendapatan Pajak Penghasilan				
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah				
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan				
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan				
Pendapatan Cukai				
Pendapatan Pajak Lainnya				
Pendapatan Bea Masuk				
Pendapatan Bea Keluar				
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0.00
<b>PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>				
Pendapatan Sumber Daya Alam				
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba				
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya				
423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	421,500	623,583	( 202,083)	32.40
423752 Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	52,482,976	3,642,066	48,840,910	( 1,341.02)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	52,904,476	4,265,649	48,840,910	( 1,308.61)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	52,904,476	4,265,649	48,638,827	1,140.24
<b>PENDAPATAN HIBAH</b>				
Pendapatan Hibah				
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	0.00
<b>JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL</b>	<b>52,904,476</b>	<b>4,265,649</b>	<b>48,638,827</b>	<b>( 1,308.61)</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>				
<b>Beban Pegawai</b>				
511111 Beban Gaji Pokok PNS	2,544,299,860	2,601,667,780	( 57,367,920)	( 2.20)
511119 Beban Pembulatan Gaji PNS	39,820	59,228	( 19,408)	( 32.76)
511121 Beban Tunj. Suami/Istri PNS	155,804,390	164,180,714	( 8,376,324)	( 5.10)
511122 Beban Tunj. Anak PNS	44,020,590	52,560,178	( 8,539,588)	( 16.24)
511123 Beban Tunj. Struktural PNS	72,670,000	79,700,000	( 7,030,000)	( 8.82)
511124 Beban Tunj. Fungsional PNS	361,400,000	357,195,000	4,205,000	1.17
511125 Beban Tunj. PPh PNS	44,564,656	70,960,082	( 26,395,426)	( 37.19)
511126 Beban Tunj. Beras PNS	114,061,500	139,077,590	( 25,016,090)	( 17.98)
511129 Beban Uang Makan PNS	290,570,000	542,136,000	( 251,566,000)	( 46.40)
511151 Beban Tunjangan Umum PNS	9,430,000	27,625,000	( 18,195,000)	( 65.86)
512211 Beban Uang Lembur	66,358,000	80,000,000	( 13,642,000)	( 17.05)
512411 Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	4,263,978,618	4,224,539,606	39,439,012	0.93
Jumlah Beban Pegawai	7,967,197,434	8,339,701,178	39,439,012	( 247.53)
<b>Beban Persediaan</b>				

**LAPORAN OPERASIONAL  
TINGKAT SATUAN KERJA**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2016 DAN 2015  
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
UNIT ORGANISASI : 01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
WILAYAH/PROPINSI : 3400 PROP. SULAWESI BARAT  
SATUAN KERJA : 689266 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI BARAT

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2016	2015	Jumlah	%
1	2	3	4	5
593111 Beban Persediaan konsumsi	169,194,611	178,899,575	( 9,704,964)	( 5.42)
<b>Jumlah Beban Persediaan</b>	<b>169,194,611</b>	<b>178,899,575</b>	<b>( 9,704,964)</b>	<b>( 5.42)</b>
<b>Beban Barang dan Jasa</b>				
521111 Beban Keperluan Perkantoran	817,996,618	579,210,260	238,786,358	41.22
521114 Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	30,891,609	14,944,888	15,946,721	106.70
521115 Beban Honor Operasional Satuan Kerja	158,100,000	120,187,500	37,912,500	31.54
521119 Beban Barang Operasional Lainnya	25,823,100	18,075,000	7,748,100	42.86
521211 Beban Bahan	17,788,260	0	17,788,260	0.00
521213 Beban Honor Output Kegiatan	10,920,000	9,870,000	1,050,000	10.63
522111 Beban Langganan Listrik	272,242,704	263,001,926	9,240,778	3.51
522112 Beban Langganan Telepon	17,969,268	13,843,150	4,126,118	29.80
522141 Beban Sewa	197,492,500	192,349,167	5,143,333	2.67
522151 Beban Jasa Profesi	11,250,000	10,000,000	1,250,000	12.50
<b>Jumlah Beban Barang dan Jasa</b>	<b>1,560,474,059</b>	<b>1,221,481,891</b>	<b>1,250,000</b>	<b>281.47</b>
<b>Beban Pemeliharaan</b>				
523111 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	306,514,800	389,358,650	( 82,843,850)	( 21.27)
523121 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	69,798,672	101,400,943	( 31,602,271)	( 31.16)
<b>Jumlah Beban Pemeliharaan</b>	<b>376,313,472</b>	<b>490,759,593</b>	<b>( 31,602,271)</b>	<b>( 52.44)</b>
<b>Beban Perjalanan Dinas</b>				
524111 Beban Perjalanan Biasa	2,152,830,806	2,905,221,454	( 752,390,648)	( 25.89)
524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	37,730,000	58,850,000	( 21,120,000)	( 35.88)
524114 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	30,000,000	0	30,000,000	0.00
<b>Jumlah Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>2,220,560,806</b>	<b>2,964,071,454</b>	<b>30,000,000</b>	<b>( 61.78)</b>
<b>Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat</b>				
<b>Beban Bunga</b>				
<b>Beban Subsidi</b>				
<b>Beban Hibah</b>				
<b>Beban Bantuan Sosial</b>				
<b>Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>				
591111 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1,184,697,223	1,024,424,355	160,272,868	15.64
591211 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	690,424,610	1,038,886,396	( 348,461,786)	( 33.54)
591311 Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	113,729,593	113,729,592	1	0.00
591313 Beban Penyusutan Jaringan	279,442,243	279,442,243	0	
<b>Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>				
<b>Beban Transfer</b>				
<b>Beban Lain-Lain</b>				
<b>JUMLAH BEBAN OPERASIONAL</b>	<b>14,562,034,051</b>	<b>15,651,396,277</b>	<b>( 1,089,362,226)</b>	<b>( 103.61)</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>( 14,509,129,575)</b>	<b>( 15,647,130,628)</b>	<b>1,138,001,053</b>	<b>( 1,205.00)</b>

**LAPORAN OPERASIONAL  
TINGKAT SATUAN KERJA**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2016 DAN 2015  
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
UNIT ORGANISASI : 01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
WILAYAH/PROPINSI : 3400 PROP. SULAWESI BARAT  
SATUAN KERJA : 689266 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI BARAT

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2016	2015	Jumlah	%
1	2	3	4	5
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>				
<b>SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR</b>				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar				
Beban Pelepasan Aset Non Lancar				
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0.00
<b>SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>				
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
Jumlah Surplus/(defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0.00
<b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA</b>				
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
423951 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	3,440,000	85,563	3,354,437	( 3,920.42)
491511 Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	133,650	0	133,650	0.00
Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	3,573,650	85,563	133,650	( 3,920.42)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	2,018,663	0	2,018,663	0.00
Jumlah Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2,018,663	0	2,018,663	0.00
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,554,987	322,593,650	( 321,038,663)	( 99.51)
<b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>1,554,987</b>	<b>85,563</b>	<b>1,469,424</b>	<b>( 3,920.42)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>				
Beban Luar Biasa				
<b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT) - LO</b>	<b>( 14,507,574,588)</b>	<b>( 15,355,544,778)</b>	<b>847,970,190</b>	<b>( 4,625.43)</b>

**LAPORAN OPERASIONAL  
 TINGKAT SATUAN KERJA**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2016 DAN 2015  
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
 UNIT ORGANISASI : 01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
 WILAYAH/PROPINSI : 3400 PROP. SULAWESI BARAT  
 SATUAN KERJA : 689266 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI BARAT

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2016	2015	Jumlah	%
1	2	3	4	5

Maujud, 23 Maret 2017  
 Kepala Perwakilan  
  
 Wasis Prabowo  
 NIP. 19651031 198703 1 001



**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
TINGKAT SATUAN KERJA**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016  
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
UNIT ORGANISASI : 01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
WILAYAH/PROPINSI : 3400 PROP. SULAWESI BARAT  
SATUAN KERJA : 689266 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI BARAT

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	31 DESEMBER 2016	31 Desember 2015	Jumlah	%
1	2	3	4	5
<b>EKUITAS AWAL</b>	<b>43,409,620,635</b>	<b>43,546,483,391</b>	<b>( 136,862,756)</b>	<b>( 0.31)</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>	<b>( 14,507,574,588)</b>	<b>( 15,355,544,778)</b>	<b>847,970,190</b>	<b>( 5.52)</b>
<b>DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN MENDASAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>KOREKSI YANG MENAMBAH / MENGURANGI EKUITAS</b>	<b>351,159,966</b>	<b>( 315,402,721)</b>	<b>666,562,687</b>	<b>( 211.33)</b>
Penyesuaian Nilai Aset	0	3,880,285	( 3,880,285)	( 100.00)
391117 Penyesuaian Nilai Persediaan	0	3,880,285	( 3,880,285)	( 100.00)
311312 Pengembalian Pendapatan BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0	0.00
311313 SAL Selisih Kurs Belum Terealisasi	0	0	0	0.00
311315 Penyesuaian SAL BLU	0	0	0	0.00
Koreksi Nilai Persediaan	0	0	0	0.00
391113 Koreksi Nilai Persediaan	0	0	0	0.00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0	0	0	0.00
391114 Revaluasi Aset Tetap	0	0	0	0.00
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	351,159,966	( 319,283,006)	670,442,972	( 209.98)
391116 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	351,159,966	( 319,283,006)	670,442,972	( 209.98)
391118 Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	0	0	0	0.00
Koreksi Lain-lain	0	0	0	0.00
391119 Koreksi Lainnya	0	0	0	0.00
391121 Ekuitas Transaksi Lainnya	0	0	0	0.00
<b>TRANSAKSI ANTAR ENTITAS</b>	<b>12,186,597,960</b>	<b>15,534,084,743</b>	<b>( 3,347,486,783)</b>	<b>( 21.54)</b>
313111 Ditagihkan Ke Entitas Lain	12,242,942,436	15,860,944,042	( 3,618,001,606)	( 22.81)
313121 Diterima Dari Entitas Lain	( 56,344,476)	( 326,859,299)	270,514,823	( 82.76)
313211 Transfer Keluar	0	0	0	0.00
313221 Transfer Masuk	0	0	0	0.00
313231 Transaksi Pengelolaan Investasi BA BUN pada BLU	0	0	0	0.00
391131 Pengesahan Hibah Langsung	0	0	0	0.00
391132 Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	0	0	0	0.00
391141 Setoran Surplus BLU	0	0	0	0.00
<b>KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS</b>	<b>( 1,969,816,662)</b>	<b>( 136,862,756)</b>	<b>( 1,832,953,906)</b>	<b>1,339.26</b>
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>41,439,803,973</b>	<b>43,409,620,635</b>	<b>( 1,969,816,662)</b>	<b>( 4.53)</b>

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
 TINGKAT SATUAN KERJA**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016  
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
 UNIT ORGANISASI : 01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
 WILAYAH/PROPINSI : 3400 PROP. SULAWESI BARAT  
 SATUAN KERJA : 689266 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI BARAT

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	31 DESEMBER 2016	31 Desember 2015	Jumlah	%
1	2	3	4	5

Mamuju, 23 Maret 2017  
 Kepala Perwakilan  
  
 Anasis Prabowo  
 NIP. 19651031 198703 1 001



# **LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN  
TAHUN 2016  
(dalam rupiah)

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089**      **BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**  
**ESELON I : 01**      **BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**  
**WILAYAH/PROPINSI : 3400**      **PROP. SULAWESI BARAT**  
**SATUAN KERJA : 689266**      **PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI BARAT**  
**JENIS SATUAN KERJA : KD**      **KANTOR DAERAH**

Kode Lap. : LRBST 02  
Tanggal : Wednesday, April 05,  
Halaman : 1  
Prog.Id : lu\_irabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>TRANSAKSI KAS</b>								
01	RUPIAH MURNI								
0	RM								
01	PELAYANAN UMUM								
01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI								
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP								
3670	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP								
994	Layanan Perkantoran								
51	BELANJA PEGAWAI								
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS								
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	2,734,844,000	2,604,844,000	2,544,299,860	2,544,299,860	0	2,544,299,860	97.68	60,544,140
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	46,000	46,000	41,121	41,121	( 1,301)	39,820	86.57	6,180
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	170,626,000	163,626,000	155,804,390	155,804,390	0	155,804,390	95.22	7,821,610
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	56,951,000	49,951,000	44,020,590	44,020,590	0	44,020,590	88.13	5,930,410
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	53,060,000	74,560,000	72,670,000	72,670,000	0	72,670,000	97.47	1,890,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	325,360,000	362,860,000	361,850,000	361,850,000	( 450,000)	361,400,000	99.60	1,460,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	32,198,000	49,698,000	44,564,656	44,564,656	0	44,564,656	89.67	5,133,344
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	137,676,000	125,676,000	114,061,500	114,061,500	0	114,061,500	90.76	11,614,500
511129	Belanja Uang Makan PNS	498,960,000	334,460,000	290,570,000	290,570,000	0	290,570,000	86.88	43,890,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	61,950,000	15,950,000	10,540,000	10,540,000	( 1,110,000)	9,430,000	59.12	6,520,000
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111</b>	<b>4,071,671,000</b>	<b>3,781,671,000</b>	<b>3,638,422,117</b>	<b>3,638,422,117</b>	<b>( 1,561,301)</b>	<b>3,636,860,816</b>	<b>96.21</b>	<b>144,810,184</b>
5122	Belanja Lembur								

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN  
TAHUN 2016  
(dalam rupiah)

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089**      **BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**  
**ESELON I : 01**      **BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**  
**WILAYAH/PROPINSI : 3400**      **PROP. SULAWESI BARAT**  
**SATUAN KERJA : 689266**      **PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI BARAT**  
**JENIS SATUAN KERJA : KD**      **KANTOR DAERAH**

Kode Lap. : LRBST 02  
Tanggal : Wednesday, April 05,  
Halaman : 2  
Prog.Id : lu\_irabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
512211	Belanja Uang Lembur	80,000,000	80,000,000	79,994,000	79,994,000	( 13,636,000)	66,358,000	82.95	13,642,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	80,000,000	80,000,000	79,994,000	79,994,000	( 13,636,000)	66,358,000	99.99	13,642,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito								
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	5,098,754,000	4,498,754,000	4,322,698,872	4,322,698,872	( 3,105,874)	4,319,592,998	96.02	179,161,002
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	5,098,754,000	4,498,754,000	4,322,698,872	4,322,698,872	( 3,105,874)	4,319,592,998	96.09	179,161,002
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	9,250,425,000	8,360,425,000	8,041,114,989	8,041,114,989	( 18,303,175)	8,022,811,814	96.18	337,613,186
52	BELANJA BARANG								
5211	Belanja Barang Operasional								
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	852,091,000	846,399,000	817,996,618	817,996,618	0	817,996,618	96.64	28,402,382
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	24,000,000	30,892,000	30,891,609	30,891,609	0	30,891,609	100.00	391
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	156,960,000	158,100,000	158,100,000	158,100,000	0	158,100,000	100.00	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	21,790,000	35,824,000	25,823,100	25,823,100	0	25,823,100	72.08	10,000,900
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	1,054,841,000	1,071,215,000	1,032,811,327	1,032,811,327	0	1,032,811,327	96.41	38,403,673
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	12,520,000	12,520,000	10,920,000	10,920,000	0	10,920,000	87.22	1,600,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	12,520,000	12,520,000	10,920,000	10,920,000	0	10,920,000	87.22	1,600,000
5221	Belanja Jasa								
522111	Belanja Langganan Listrik	300,000,000	266,755,000	266,754,895	266,754,895	0	266,754,895	100.00	105
522112	Belanja Langganan Telepon	24,000,000	17,214,000	17,197,632	17,197,632	0	17,197,632	99.90	16,368
522141	Belanja Sewa	190,000,000	200,560,000	200,560,000	200,560,000	0	200,560,000	100.00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	514,000,000	484,529,000	484,512,527	484,512,527	0	484,512,527	100.00	16,473
5231	Belanja Pemeliharaan								
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	264,175,000	316,516,000	306,514,800	306,514,800	0	306,514,800	96.84	10,001,200
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	54,000,000	0	0	0	0	0	0.00	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN  
TAHUN 2016  
(dalam rupiah)

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089**      **BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**  
**ESELON I : 01**      **BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**  
**WILAYAH/PROPINSI : 3400**      **PROP. SULAWESI BARAT**  
**SATUAN KERJA : 689266**      **PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI BARAT**  
**JENIS SATUAN KERJA : KD**      **KANTOR DAERAH**

Kode Lap. : LRBST 02  
Tanggal : Wednesday, April 05,  
Halaman : 3  
Prog.Id : lu\_irabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
523121	Bangunan								
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	119,949,000	79,799,000	69,798,672	69,798,672	0	69,798,672	87.47	10,000,328
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	438,124,000	396,315,000	376,313,472	376,313,472	0	376,313,472	94.95	20,001,528
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	2,019,485,000	1,964,579,000	1,904,557,326	1,904,557,326	0	1,904,557,326	96.94	60,021,674
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 3670.994	11,269,910,000	10,325,004,000	9,945,672,315	9,945,672,315	( 18,303,175)	9,927,369,140	96.33	397,634,860
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 3670	11,269,910,000	10,325,004,000	9,945,672,315	9,945,672,315	( 18,303,175)	9,927,369,140	96.33	397,634,860
3676	Fasilitas Dukungan Manajemen BPKP								
001	Laporan Laporan Dukungan manajemen BPKP								
52	BELANJA BARANG								
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri								
524111	Belanja Perjalanan Biasa	466,821,000	471,821,000	471,433,822	471,433,822	0	471,433,822	99.92	387,178
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	35,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	100.00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	501,821,000	501,821,000	501,433,822	501,433,822	0	501,433,822	99.92	387,178
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	501,821,000	501,821,000	501,433,822	501,433,822	0	501,433,822	99.92	387,178
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 3676.001	501,821,000	501,821,000	501,433,822	501,433,822	0	501,433,822	99.92	387,178
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 3676	501,821,000	501,821,000	501,433,822	501,433,822	0	501,433,822	99.92	387,178
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 01.01.01	11,771,731,000	10,826,825,000	10,447,106,137	10,447,106,137	( 18,303,175)	10,428,802,962	96.49	398,022,038
06	Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah								
3701	Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP								
003	Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP								
52	BELANJA BARANG								

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN  
TAHUN 2016  
(dalam rupiah)

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089**      **BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**  
**ESELON I : 01**      **BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**  
**WILAYAH/PROPINSI : 3400**      **PROP. SULAWESI BARAT**  
**SATUAN KERJA : 689266**      **PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI BARAT**  
**JENIS SATUAN KERJA : KD**      **KANTOR DAERAH**

Kode Lap. : LRBST 02  
Tanggal : Wednesday, April 05,  
Halaman : 4  
Prog.Id : lu\_irabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521211	Belanja Bahan	11,850,000	18,656,000	17,788,260	17,788,260	0	17,788,260	95.35	867,740
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	11,850,000	18,656,000	17,788,260	17,788,260	0	17,788,260	95.35	867,740
5218	Belanja Barang Persediaan								
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	47,404,000	29,000,000	28,904,100	28,904,100	0	28,904,100	99.67	95,900
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	47,404,000	29,000,000	28,904,100	28,904,100	0	28,904,100	99.67	95,900
5221	Belanja Jasa								
522151	Belanja Jasa Profesi	12,500,000	11,250,000	11,250,000	11,250,000	0	11,250,000	100.00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	12,500,000	11,250,000	11,250,000	11,250,000	0	11,250,000	100.00	0
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri								
524111	Belanja Perjalanan Biasa	1,001,080,000	1,009,436,000	997,997,531	997,997,531	0	997,997,531	98.87	11,438,469
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	121,000,000	42,475,000	37,730,000	37,730,000	0	37,730,000	88.83	4,745,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	1,122,080,000	1,051,911,000	1,035,727,531	1,035,727,531	0	1,035,727,531	98.46	16,183,469
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,193,834,000	1,110,817,000	1,093,669,891	1,093,669,891	0	1,093,669,891	98.46	17,147,109
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 3701.003	1,193,834,000	1,110,817,000	1,093,669,891	1,093,669,891	0	1,093,669,891	98.46	17,147,109
004	Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP (Nawa Cita 3-7)								
52	BELANJA BARANG								
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521211	Belanja Bahan	3,900,000	1,050,000	0	0	0	0	0.00	1,050,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	3,900,000	1,050,000	0	0	0	0	0.00	1,050,000
5218	Belanja Barang Persediaan								
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	15,601,000	8,566,000	8,165,000	8,165,000	0	8,165,000	95.32	401,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	15,601,000	8,566,000	8,165,000	8,165,000	0	8,165,000	95.32	401,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri								

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN  
TAHUN 2016  
(dalam rupiah)

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089**      **BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**  
**ESELON I : 01**      **BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**  
**WILAYAH/PROPINSI : 3400**      **PROP. SULAWESI BARAT**  
**SATUAN KERJA : 689266**      **PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI BARAT**  
**JENIS SATUAN KERJA : KD**      **KANTOR DAERAH**

Kode Lap. : LRBST 02  
Tanggal : Wednesday, April 05,  
Halaman : 5  
Prog.Id : lu\_lrabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
524111	Belanja Perjalanan Biasa	327,825,000	312,316,000	294,726,599	294,726,599	0	294,726,599	94.37	17,589,401
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	327,825,000	312,316,000	294,726,599	294,726,599	0	294,726,599	94.37	17,589,401
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	347,326,000	321,932,000	302,891,599	302,891,599	0	302,891,599	94.09	19,040,401
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 3701.004	347,326,000	321,932,000	302,891,599	302,891,599	0	302,891,599	94.09	19,040,401
005	Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah (Nawa Cita 3 - 7)								
52	BELANJA BARANG								
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521211	Belanja Bahan	600,000	600,000	0	0	0	0	0.00	600,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	600,000	600,000	0	0	0	0	0.00	600,000
5218	Belanja Barang Persediaan								
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2,400,000	13,546,000	11,145,130	11,145,130	0	11,145,130	82.28	2,400,870
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	2,400,000	13,546,000	11,145,130	11,145,130	0	11,145,130	82.28	2,400,870
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri								
524111	Belanja Perjalanan Biasa	93,914,000	73,768,000	71,638,615	71,638,615	0	71,638,615	97.11	2,129,385
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	93,914,000	73,768,000	71,638,615	71,638,615	0	71,638,615	97.11	2,129,385
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	96,914,000	87,914,000	82,783,745	82,783,745	0	82,783,745	94.16	5,130,255
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 3701.005	96,914,000	87,914,000	82,783,745	82,783,745	0	82,783,745	94.16	5,130,255
006	Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP (Termasuk Piloting)								
52	BELANJA BARANG								
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521211	Belanja Bahan	4,050,000	4,050,000	0	0	0	0	0.00	4,050,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	4,050,000	4,050,000	0	0	0	0	0.00	4,050,000
5218	Belanja Barang Persediaan								



LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN  
TAHUN 2016  
(dalam rupiah)

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089**      **BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**  
**ESELON I : 01**      **BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**  
**WILAYAH/PROPINSI : 3400**      **PROP. SULAWESI BARAT**  
**SATUAN KERJA : 689266**      **PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI BARAT**  
**JENIS SATUAN KERJA : KD**      **KANTOR DAERAH**

Kode Lap. : LRBST 02  
Tanggal : Wednesday, April 05,  
Halaman : 6  
Prog.Id : lu\_lrabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	16,202,000	18,393,000	17,760,000	17,760,000	0	17,760,000	96.56	633,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	16,202,000	18,393,000	17,760,000	17,760,000	0	17,760,000	96.56	633,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri								
524111	Belanja Perjalanan Biasa	348,912,000	336,277,000	317,034,239	317,034,239	0	317,034,239	94.28	19,242,761
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	348,912,000	336,277,000	317,034,239	317,034,239	0	317,034,239	94.28	19,242,761
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	369,164,000	358,720,000	334,794,239	334,794,239	0	334,794,239	93.33	23,925,761
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 3701.006	369,164,000	358,720,000	334,794,239	334,794,239	0	334,794,239	93.33	23,925,761
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 3701	2,007,238,000	1,879,383,000	1,814,139,474	1,814,139,474	0	1,814,139,474	96.53	65,243,526
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 01.01.06	2,007,238,000	1,879,383,000	1,814,139,474	1,814,139,474	0	1,814,139,474	96.53	65,243,526
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 01.01	13,778,969,000	12,706,208,000	12,261,245,611	12,261,245,611	( 18,303,175)	12,242,942,436	96.50	463,265,564
	JUMLAH BELANJA FUNGSI 01	13,778,969,000	12,706,208,000	12,261,245,611	12,261,245,611	( 18,303,175)	12,242,942,436	96.50	463,265,564
	JUMLAH BELANJA CARA PENARIKAN 0	13,778,969,000	12,706,208,000	12,261,245,611	12,261,245,611	( 18,303,175)	12,242,942,436	96.50	463,265,564
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01	13,778,969,000	12,706,208,000	12,261,245,611	12,261,245,611	( 18,303,175)	12,242,942,436	96.50	463,265,564
	JUMLAH BELANJA JENIS SATKER KD	13,778,969,000	12,706,208,000	12,261,245,611	12,261,245,611	( 18,303,175)	12,242,942,436	96.50	463,265,564
	JUMLAH TRANSAKSI KAS	13,778,969,000	12,706,208,000	12,261,245,611	12,261,245,611	( 18,303,175)	12,242,942,436	96.50	463,265,564
	JUMLAH BELANJA (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSI NON KAS	13,778,969,000	12,706,208,000	12,261,245,611	12,261,245,611	( 18,303,175)	12,242,942,436	96.50	463,265,564



# **LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA & HIBAH**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH  
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SATUAN KERJA MELALUI KPPN  
UNTUK TAHUN 2016  
(DALAM RUPIAH)**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :** 089      **BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**  
**ESELON I :** 01      **BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**  
**WILAYAH/PROPINSI :** 3400      **PROP. SULAWESI BARAT**  
**SATUAN KERJA :** 689266      **PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI BARAT**  
**JENIS SATKER :** KD      **KANTOR DAERAH**

**KD. LAPORAN :** LRPS.T02  
**TANGGAL :** 05/04/17  
**HAL :** 1  
**PROG. ID :** lu\_pendsatk

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN				% REAL. PEND
			TAHUN INI	JUMLAH SAMPAI DENGAN TAHUN INI	PENGEMBALIAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI	JUMLAH NETTO SAMPAI DENGAN TAHUN INI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>TRANSAKSI KAS</b>						
<b>I</b>	<b>Penerimaan Dalam Negeri</b>						
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK						
423	PNBP LAINNYA						
4231	Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan						
42314	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN						
423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	421,500	421,500	0	421,500	0.00
	Jumlah Penerimaan 42314	0	421,500	421,500	0	421,500	0.00
	Jumlah Penerimaan 4231	0	421,500	421,500	0	421,500	0.00
4237	Pendapatan Iuran dan Denda						
42375	Pendapatan Denda						
423752	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	52,482,976	52,482,976	0	52,482,976	0.00
	Jumlah Penerimaan 42375	0	52,482,976	52,482,976	0	52,482,976	0.00
	Jumlah Penerimaan 4237	0	52,482,976	52,482,976	0	52,482,976	0.00
4239	Pendapatan Lain-lain						
42395	Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu						
423951	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	3,440,000	3,440,000	0	3,440,000	0.00
	Jumlah Penerimaan 42395	0	3,440,000	3,440,000	0	3,440,000	0.00
	Jumlah Penerimaan 4239	0	3,440,000	3,440,000	0	3,440,000	0.00
	Jumlah Penerimaan 423	0	56,344,476	56,344,476	0	56,344,476	0.00
	Jumlah Penerimaan 42	0	56,344,476	56,344,476	0	56,344,476	0.00
	<b>Jumlah Penerimaan Dalam Negeri</b>	0	56,344,476	56,344,476	0	56,344,476	0.00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH</b>	0	56,344,476	56,344,476	0	56,344,476	0.00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	0	56,344,476	56,344,476	0	56,344,476	0.00

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH  
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SATUAN KERJA MELALUI KPPN  
UNTUK TAHUN 2016  
(DALAM RUPIAH)**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089**      **BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**  
**ESELON I : 01**      **BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**  
**WILAYAH/PROPINSI : 3400**      **PROP. SULAWESI BARAT**  
**SATUAN KERJA : 689266**      **PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI BARAT**  
**JENIS SATKER : KD**      **KANTOR DAERAH**

**KD. LAPORAN : LRPS.T02**  
**TANGGAL : 05/04/17**  
**HAL : 2**  
**PROG. ID : lu\_pendsatk**

KODE	U R A I A N	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN				% REAL. PEND
			TAHUN INI	JUMLAH SAMPAI DENGAN TAHUN INI	PENGEMBALIAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI	JUMLAH NETTO SAMPAI DENGAN TAHUN INI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH</b>	0	56,344,476	56,344,476	0	56,344,476	0.00



**NERACA SIMAK  
PER 31 DESEMBER 2016**

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA  
 POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2016  
 TAHUN ANGGARAN 2016

Tanggal : 05-04-2017  
 Halaman : 1  
 Kode Lap. : LBAPKG

NAMA UAKPB : 089.01.34.689266.000 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI BARAT

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	159,702,916
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	24,658
131111	Tanah	2,042,703,750
132111	Peralatan dan Mesin	6,232,014,285
133111	Gedung dan Bangunan	34,520,500,913
134111	Jalan dan Jembatan	1,137,295,928
134113	Jaringan	3,155,499,441
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	0
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	( 3,056,299,327)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	( 1,790,586,702)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	( 284,323,981)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	( 698,605,606)
J U M L A H		41,417,926,275

Mamuju, 31 Desember 2016

Penanggung Jawab UAKPB

Kepala Perwakilan,



Wasis Prabowo

NIP 19651031 198703 1 001



## DAFTAR TANAH

**DAFTAR TANAH  
PER 31 DESEMBER 2016**

NUP	ALAMAT	LUAS (M2)	NILAI (Rp)
1.	Kelurahan Rangas Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju	5.310	239.613.750
2.	Kelurahan Rangas Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju	10.000	1.803.090.000
TOTAL			2.042.703.750





**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI BARAT**

**Jln. Abdul Malik Pattana Endeng, Mamuju. 91512**

**Telp. (0426) 21088, 21434. Fax. (04260 21137. Email: [sulawesi.barat@bpkp.go.id](mailto:sulawesi.barat@bpkp.go.id)**